

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Seiring dengan terus berkembangnya dunia bisnis, perusahaan menjadi semakin sadar akan dampak sosial dan lingkungan dari operasi mereka. Sebelumnya perusahaan hanya berfokus pada memaksimalkan keuntungan, tetapi hari ini, mereka menyadari pentingnya keberlanjutan dan mengambil langkah untuk mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan (Wahyuningrum Sri Fajarini et al., 2023).

Pada era globalisasi seperti sekarang ini tujuan berdirinya sebuah perusahaan semakin berubah. Tujuan awal didirikannya sebuah perusahaan adalah untuk mendapatkan laba semaksimal mungkin dengan meminimalisir pengeluaran biaya. Namun, tujuan tersebut telah berubah, selain memaksimalkan keuntungan perusahaan juga harus mempertimbangkan dampak terhadap masyarakat, lingkungan, karyawan dan konsumen yang dikenal dengan konsep tripple bottom line (people, planet, profit) (Silvana & Khomsyiah, 2023).

Konsep tripple bottom line ini memiliki perhatian yang signifikan sehubungan dengan keberhasilan dan kecukupannya sebagai alat untuk melaporkan sejauh mana sebuah organisasi telah memenuhi tanggung jawab sosialnya. Pengungkapan ini pun sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap para pemangku kepentingan dalam mencapai tujuan pengembangan keberlanjutan

perusahaan dan merupakan bukti keperdulian perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan yang dicerminkan dari pengungkapan laporan keberlanjutan yang didasarkan pada standar pelaporan keberlanjutan yang umumnya dikenal dengan (*Global Reporting Initiative*) GRI Standar. Peran perusahaan dalam menjaga lingkungan cukup berdampak, karena sebagian besar kerusakan alam disebabkan oleh kelalaian perusahaan dalam mengelola limbah yang dihasilkannya, hal ini terjadi karena perusahaan menekan biaya untuk mengolah limbah dan untuk mencapai tujuan yang maksimal (Fushshilat Rahmanirwana Sonza et al., 2022).

Sejak tahun 2017 pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan peraturan yang mewajibkan perusahaan untuk menyampaikan laporan keberlanjutan atau *Sustainability Report*. Peraturan yang memuat informasi mengenai kegiatan sosial perusahaan yaitu (POJK Nomor 51/POJK.03/2017) tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik (Ojk.go.id, 2017). Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik wajib menerapkan keuangan berkelanjutan. Pasal 10 ayat (1) menjelaskan bahwa LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik wajib menyusun laporan keberlanjutan (Sadipun Dominika Maria, 2022).

Pasca era industrialisasi, laporan *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC), menyatakan bahwa perubahan iklim terjadi lebih cepat dan berdampak lebih besar di berbagai aspek kehidupan masyarakat (UU NO 16 TH 2016). Dampak perubahan iklim ini semakin dirasakan hingga meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menangani dampak negatif yang ditimbulkan, serta mendorong berbagai pihak untuk menyadari pentingnya keberlanjutan pada

aktivitas masyarakat dan lingkungan. Sebagai anggota G20, Indonesia diharapkan dapat meningkatkan upaya untuk mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim (Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

Selain itu, negara ini mempunyai potensi besar untuk membantu mengurangi dan mengadaptasi dampak negatif perubahan iklim (UU NO 16 Tahun 2016). Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk menerbitkan *sustainability report* di dalamnya yang terdapat pengungkapan air, kualitas kelestarian lingkungan hidup dan berpengaruh juga terhadap tercapainya tingkat kesejahteraan dan menjadi salah satu landasan keberlanjutan dalam pengelolaan suatu perusahaan (Biondi et al., 2020).

Namun, bahkan negara Indonesia sudah menjamin hal tersebut pada UUD 1945 Pasal 33 ayat 3. Permasalahan tentang pengungkapan air masih terjadi di Indonesia. Beberapa negara berkembang lainnya termasuk di antara negara yang diprediksi mengalami krisis air di masa mendatang (Sjaifuddin, 2020). Permasalahan air yang utama di negara Indonesia adalah pencemaran air yang disebabkan oleh penyaluran limbah industri ke tanah, limbah dari tempat pembuangan sampah, tumpahan minyak, pembuangan limbah radioaktif, dan pembuangan limbah cair (Tingey Holyoak & Pisaniello, 2019). Dengan adanya laporan keberlanjutan, air merupakan tanggung jawab perusahaan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya *water disclosure* untuk menjaga ketertiban dan mencegah kerusakan sumber daya air (Prasetyo, 2020). Pengungkapan air yang menjadi bagian dalam kinerja lingkungan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tidak dilaporkan secara lengkap.

Pengungkapan air hanya menjadi bagian kecil dalam pengungkapan lingkungan (Hoang et al., 2020).

Pengungkapan Air merupakan elemen penting dalam mewujudkan hak asasi manusia secara progresif, tetapi dibandingkan dengan sumber daya alam lainnya, kelestarian air seringkali diabaikan. World Economic Forum, melaporkan bahwa krisis air menempati posisi ketiga sebagai ancaman terbesar populasi global (World Economic Forum, 2017). Berbagai pihak di dunia telah menunjukkan aksinya dalam upaya mengurangi risiko masalah ini. Hal ini juga karena adanya tuntutan dari para pemangku kepentingan agar perusahaan lebih memperhatikan lingkungan dan keberlanjutan perusahaan. Salah satu aksi yang dilakukan oleh perusahaan adalah dengan melakukan pengungkapan air. Pengungkapan air yang dilakukan perusahaan memberikan informasi bagi pemangku kepentingan mengenai pengelolaan air dan respon perusahaan akan krisis air yang mengancam keberlanjutan perusahaan, dan berguna untuk membuat keputusan (Wang et al., 2020).

Krisis air memiliki dampak yang luas terhadap berbagai aktivitas manusia baik rumah tangga maupun bisnis. Keterlibatan perusahaan dalam krisis air menimbulkan pertanyaan tentang peran yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam mencari solusi terkait masalah lingkungan khususnya mengenai pengungkapan air. Untuk menjaga keberlanjutan air dan menghentikan hancurnya sumber mata air, perusahaan memiliki kewajiban untuk mengungkapkan penggunaan air mereka. Pengungkapan air atau *water disclosure* dapat digunakan untuk menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap lingkungan khususnya

mengenai pengelolaan air dan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap *stakeholder* (Dolan et al., 2021).

Kelangkaan air yang terjadi diberbagai daerah menciptakan konflik antara penduduk lokal dan perusahaan sebagai pengguna air terbesar, serta aktivitas perusahaan memiliki potensi merusak lingkungan air. Perusahaan yang kekurangan air akan kesulitan untuk melakukan kegiatan operasionalnya. Disisi lain, jika perusahaan memiliki konflik dengan masyarakat lokal maka reputasi perusahaan akan turun dan kehilangan dari pemangku kepentingan. Hal ini menyoroti pentingnya menjaga hubungan dengan masyarakat, pemangku kepentingan, dan lingkungan karena akan menentukan kesuksesan perusahaan dalam jangka panjang. Untuk mengatasi masalah ini, perusahaan melakukan pengungkapan air untuk memberikan informasi kepada pemangku kepentingan mengenai berbagai aksi perusahaan dalam mengelola air dan upaya mengurangi risiko air. CEO Mandate juga menyarankan agar perusahaan berupaya untuk mengidentifikasi risiko dan peluang pengelolaan terkait dengan air (CEO Water Mandate, 2012).

Fenomena Perusahaan sektor energy merupakan perusahaan dengan operasi bisnis yang secara langsung memberikan dampak negatif terhadap kelestarian sumber daya alam. Perusahaan ini masuk dalam kategori perusahaan *highprofile*. Aktivitas bisnis pada perusahaan *highprofile* dikategorikan sebagai aktivitas dengan tingkat sensitivitas tinggi terkait dengan keberlanjutan lingkungan, risiko politik, dan persaingan bisnis. Oleh karena itu, perusahaan sektor *highprofile* mendapatkan perhatian luas dari masyarakat sehingga masyarakat cenderung menuntut perusahaan untuk mengungkapkan informasi bahwa perusahaan telah

melaksanakan tanggung jawab lingkungan. Tetapi masih banyak perusahaan sektor energy yang tidak mengungkapkan informasi tanggung jawab lingkungan termasuk informasi pengelolaan air perusahaan. Energi memiliki peran penting untuk menjalankan aktivitas sehari-hari, khususnya perusahaan untuk menjalankan aktivitas operasinya. Perusahaan sektor energi akan meningkatkan produksinya untuk memenuhi peningkatan permintaan energi dari berbagai sektor. Perusahaan sektor energi memiliki tanggung jawab atas yang dihasilkannya. Sebagai bentuk tanggung jawabnya, perusahaan sektor energi dapat melakukan pengungkapan yang dihasilkan dalam laporan keberlanjutan.

Standar yang digunakan dalam penelitian ini adalah GRI Standards karena merupakan standar yang digunakan oleh perusahaan yang diteliti dan paling banyak digunakan oleh berbagai perusahaan di seluruh penjuru dunia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan teknik *content analysis*. Data yang digunakan berupa data sekunder, yaitu laporan keberlanjutan dari lima perusahaan sektor energi yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2022. Kelima perusahaan tersebut adalah PT. AKR Corporindo Tbk (AKRA), PT Bumi Resources Tbk (BUMI), PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG), PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS), dan PT Bukit Asam Tbk (PTBA). Perusahaan, terutama yang bergerak di bidang manufaktur, pertambangan, dan pertanian, mengkonsumsi lebih dari 60% sumber daya air tawar dunia dan berkorelasi erat dengan berbagai insiden pengungkapan air (CDP, 2015). Alasan utama dari konsekuensi yang merugikan ini adalah kemungkinan manajer perusahaan memiliki kesadaran yang terbatas terhadap risiko pengungkapan air,

dan isi pengungkapan air tidak terorganisir (Zeng et al., 2020). Pengungkapan air menyiratkan bahwa perusahaan melaporkan informasi yang terkait dengan status pengelolaan sumber daya air mereka kepada para pemangku kepentingan, termasuk bagaimana menerapkan strategi pengelolaan sumber daya air, strategi pengelolaan sumber daya air dan dampaknya terhadap bisnis lainnya (Zhou et al., 2018).

Fenomena Pengungkapan air yang terjadi pada PT. Kaltim Prima Coal (KPC). Pengungkapan air menjadi bagian dari pencemaran air yang diakibatkan oleh aktivitas perusahaan pertambangan menyebabkan permasalahan air di Indonesia menjadi tidak sederhana dan industri pertambangan merupakan industri yang paling bergantung dan mengonsumsi banyak air. Kasus pengungkapan pencemaran air yang disebabkan oleh limbah dari operasi tambang milik Grup Bakrie, PT Kaltim Prima Coal (KPC), disebut-sebut telah mencemari Sungai Sangatta di Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur (Kaltim). Akibatnya, Sungai Sangatta berubah warna menjadi coklat pekat seperti warna kopi susu. Akibat pengungkapan pencemaran ini, PDAM Kutai Timur sempat mengurangi produksinya. Warga harus rela kekurangan air bersih karena PDAM menggilir aliran air. “Sungai Sangatta adalah sumber air baku PDAM. Jadi, karena pengungkapan air yang menjadi dari bagian pencemaran ini, kapasitas produksi diturunkan sampai 60%. (www.sindonews.com)



Gambar 1. 1

Perusahaan, terutama yang bergerak di bidang manufaktur, pertambangan, dan pertanian, mengkonsumsi lebih dari 60% sumber daya air tawar dunia dan berkorelasi erat dengan berbagai insiden pengungkapan pencemaran air (CDP, 2015). Alasan utama dari konsekuensi yang merugikan ini adalah kemungkinan manajer perusahaan memiliki kesadaran yang terbatas terhadap risiko air, dan isi pengungkapan air tidak terorganisir (Zeng et al, 2020). Pengungkapan air menyiratkan bahwa perusahaan melaporkan informasi yang terkait dengan status pengelolaan sumber daya air mereka kepada para pemangku kepentingan, termasuk

bagaimana menerapkan strategi pengelolaan sumber daya air, strategi pengelolaan sumber daya air dan dampaknya terhadap bisnis lainnya (Zhou et al., 2018).

Indonesia merupakan negara dengan tingkat pengungkapan air (*water disclosure*) paling rendah di ASEAN (Fitriasari & Kawahara, 2018). Faktor yang menyebabkan pengungkapan air perusahaan di Indonesia rendah karena laporan pengungkapan air masih bersifat *voluntary* atau sukarela. Indeks pengungkapan air pada penelitian ini melengkapi beberapa elemen pengungkapan air yang sudah ada, baik dari GRI 303 maupun beberapa pedoman pengungkapan air yang disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Perusahaan masih menganggap bahwa pengungkapan air bukan merupakan suatu yang krusial. Sehingga, sering kali dalam laporan pengungkapan tidak dicantumkan mengenai informasi air yang digunakan perusahaan. Alasan lain adalah kurangnya permintaan pengungkapan air oleh pemangku kepentingan dan juga minat untuk mencari legitimasi dari pengungkapan masih di nilai kurang (Adhariani, 2021). Bentuk upaya perusahaan terhadap keberlanjutan adalah pengungkapan lingkungan yang di dalamnya terdapat pengungkapan air (Kontesa et al., 2020). Terlihat dari beberapa kasus pencemaran lingkungan, permasalahan lingkungan yang selalu muncul dan menjadi diskusi publik di setiap negara. Salah satu fenomena penting adalah pengungkapan lingkungan yang didalamnya terdapat pengungkapan air. Penekanan yang diberikan terhadap kerusakan lingkungan air akan berdampak pada diskusi publik dan perusahaan yang diberitakan. Hal ini akan menyebabkan perusahaan lebih terbuka dalam menyampaikan informasi pengungkapan lingkungan dan pengungkapan air,

dengan menuntut semua elemen yang ada di perusahaan untuk bekerja dengan baik dan menghasilkan keuntungan sesuai yang diharapkan (Elsayed & Ammar, 2020).

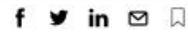
Fenomena selanjutnya Indonesia, akan menjadi tuan rumah World Water Forum (WWF) X, di tengah ancaman krisis air di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Berbagai pihak mendorong agar kegiatan ini jadi momentum bagi pemerintah menegaskan kembali komitmen menjaga atau melindungi kekayaan air negeri ini. Indonesia punya sumber air melimpah di dalam maupun permukaan. Sayangnya, pengungkapan sumber-sumber air itu menghadapi berbagai masalah dan ancaman seperti alih fungsi lahan, deforestasi, tercemar limbah dari berbagai aktivitas di darat maupun perairan dan lain-lain. Status Lingkungan Hidup Indonesia (SLHI) 2020, dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebut, dari 3,9 triliun meter kubik per tahun sumber air, hanya 17,69% atau setara 691,3 juta meter kubik per tahun bisa dimanfaatkan. Itu pun, 25% terpakai untuk irigasi.

Gunawan Wibisono, Pakar Hidrologi Universitas Merdeka Malang, menyebutkan, kekayaan air di Indonesia didominasi sumber permukaan dari 5.590 sungai, 1.035 danau, 209 bendungan (waduk), serta 2.042 embung. Sayangnya, sumber air permukaan ini secara kuantitas terus alami penurunan karena daya tampung rendah. Dari kapasitas ideal 1.975 meter kubik per tahun per kapita, air tertampung hanya 50 meter kubik atau hanya 2,5%. Rendahnya daya tampung sungai atau bendungan, terpicu alih fungsi lahan di daerah aliran sungai (DAS).

Pengelolaan sumber air di Indonesia, memang menghadapi banyak persoalan. Secara kuantitas, eksploitasi berlebihan hingga alih fungsi lahan, termasuk deforestasi berpotensi menurunkan cadangan sumber air. Begitu juga kualitasnya. Pencemaran menyebabkan sumber daya alam tak bisa dipergunakan. Secara kuantitas kita bermasalah karena alih fungsi lahan, baik untuk permukiman, pertanian dan industri, begitu juga dengan kualitasnya. Kegiatan industri, pembuangan limbah yang tak terkontrol menjadikan air tercemar dan tidak bisa dipakai. Hasil ekspedisi sungai oleh Lembaga Konservasi Lahan Basah mengonfirmasi temuan itu. Dari puluhan sungai strategis nasional yang dilakukan kajian, semua dalam kondisi tercemar. Sebelumnya, Ecoton penelitian terhadap 60 sungai strategis nasional dari Sabang sampai Merauke. Kendati pun fokus utama penelitian untuk mengetahui kandungan mikroplastik, namun, tidak sedikit sungai terpapar logam berat. Semua tercemar hanya memang, masing-masing regional memiliki tipikal dan konsentrasi berbeda. Untuk sungai-sungai di daerah tambang, seperti di Sulawesi, paparan terbesar memang logam berat. Di daerah perkebunan sawit, bahan pencemar seperti sulfur dan bahan-bahan kimia karena penggunaan pestisida (www.mongabay.co.id)

World Water Forum : Menagih Komitmen Pemerintah Jaga Sumber Air

oleh A. Asnawi di 16 May 2024



Gambar 1. 2

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa sektor enegy yang harusnya menjadi perusahaan tambang ini harus segera memperbaiki kebijakan dan menyelaraskan dengan Taksonomi Hijau yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Otoritas Jasa Keuangan sebagai leading sektor, harus melihat bagaimana pembiayaan yang cair dikaitkan dengan komitmen tujuan pembangunan berkelanjutan *sustainable development goals* (SDGs).

Berdasarkan kasus-kasus pengungkapan air diatas, dapat memperkuat bahwa pengungkapan air oleh perusahaan sangat diperlukan. *Water disclosure* merupakan topik penelitian yang masih sedikit dilakukan (Zhou et. al., 2018). *Water disclosure* merupakan salah satu bagian dari pengungkapan lingkungan yang dilaporkan secara tidak lengkap. *Water disclosure* merupakan laporan yang dirancang untuk mengevaluasi bagaimana perusahaan dalam mengelola sumber daya air dan yang mencakup laporan keberlanjutan air, pembuangan air, kebijakan air strategis, profil air dari area di mana perusahaan menggunakan air, pendekatan perusahaan terhadap konservasi air, dan laporan mengenai risiko, peluang, dan dampak bisnis terkait air.

Water disclosure dapat meningkatkan kualitas dan kelengkapan informasi akuntansi.

Maka dari itu dibutuhkan upaya untuk mengurangi pencemaran lingkungan, pengelolaan air dengan cara kepedulian perusahaan terhadap pengungkapan air. Kepedulian tersebut dapat dilihat dari pengungkapan air (*water disclosure*) yang merupakan bagian dari pengungkapan lingkungan. Pelaporan mengenai informasi *Water Disclosure* menjadi satu dengan pengungkapan lingkungan dalam *annual report*. Hal ini membuat pengungkapan air tidak spesifik. Kebaruan dari penelitian ini mengumpulkan indeks pengungkapan air dalam menjelaskan fenomena pengungkapan air di Indonesia. Pengungkapan air yang telah disusun memiliki kelebihan mudah untuk digunakan karena disesuaikan dengan kondisi di Indonesia, dengan memberikan penekanan pada pelaporan perusahaan agar lebih komprehensif mengenai praktik pengelolaan air di perusahaan, sehingga menjadikan aktivitas perusahaan lebih bertanggung jawab (Djuminah, 2020).

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan air terutama berfokus pada pentingnya tekanan pemangku kepentingan (Zhang dkk., 2021, Wicaksono dan Setiawan, 2023) dan karakteristik perusahaan (Burritt dkk., 2016, Yu dkk., 2020, Zhang dkk., 2021, Yu., 2022). Namun, belum ada penelitian yang berfokus pada hubungan antara tekanan pemangku kepentingan, tata kelola perusahaan dan pengungkapan air. Beberapa penelitian telah memberikan bukti empiris bahwa tekanan pemangku kepentingan merupakan pendorong signifikan terhadap pengungkapan air terkait CSR (Muttakin dan Subramaniam, 2015, Qa'dan dan Suwaidan, 2019, Ullah et al., 2019). Disarankan agar pemegang saham secara

aktif menekan dan mengawasi para manajer untuk melakukan kegiatan CSR dan mengungkapkannya kepada seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, penelitian ini ditujukan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan memberikan bukti empiris mengenai hubungan antara tekanan pemangku kepentingan, tata kelola perusahaan dan pengungkapan air.

Studi menyelidiki hubungan ini dengan menggunakan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Indonesia sebagai sampel penelitian. Hal ini didasarkan pada beberapa alasan. Pertama, penelitian sebelumnya menyelidiki praktik pengungkapan air di perusahaan di negara maju (Burritt et al., 2016 , Ben-Amar dan Chelli., 2018 , Yu et al., 2020). Hal ini karena perusahaan di negara maju lebih sadar akan isu keberlanjutan dibandingkan perusahaan di negara berkembang seperti Indonesia (Bhatia dan Makkar, 2020 , Giannarakis, 2014). Kedua, Indonesia adalah negara yang kaya akan air, namun menghadapi permasalahan air yang serius, dan air di Indonesia akan mengalami kelangkaan. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan penduduk dan ekonomi yang meningkatkan kebutuhan air. Selain itu, menurut Badan Pusat Statistik (BPS), banyak sumber air di Indonesia seperti danau dan sungai yang telah terkontaminasi limbah rumah tangga dan industri yang mengandung bahan berbahaya (Badan Pusat Statistik (BPS), 2022). Perubahan iklim kemudian memperburuk permasalahan air di Indonesia (Anbumozhi et al., 2012).

Penelitian ini menemukan hubungan negatif dan signifikan antara tekanan pemangku kepentingan, tata kelola perusahaan dan pengungkapan air dengan menggunakan data perusahaan Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

(BEI). Temuan ini menunjukkan bahwa pemegang saham institusional cenderung mengejar keuntungan jangka pendek sehingga tidak memperhitungkan pengungkapan air dan menemukan bahwa tata kelola perusahaan berhubungan positif yang signifikan dengan praktik pengungkapan air. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan berperan aktif dalam menekan pengelola untuk mengungkapkan informasi air. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi persentase perusahaan maka semakin tinggi pula tingkat pengungkapan air. Penelitian ini menemukan adanya hubungan negatif dan signifikan antara pemangku kepentingan dengan pengungkapan air, yang menunjukkan bahwa perusahaan mengungkapkan lebih sedikit informasi air ketika tata kelolaan perusahaan terkonsentrasi pada beberapa pemegang saham.

Penelitian ini memberikan beberapa kontribusi. Pertama, memberikan bukti mengenai praktik pengungkapan air di perusahaan negara berkembang, yaitu Indonesia, karena penelitian sebelumnya berfokus pada negara maju dan analisis lintas negara. Kedua, meskipun penelitian sebelumnya berfokus pada pengaruh tekanan pemangku kepentingan dan tata kelola perusahaan, penelitian menguji hubungan antara berbagai jenis perusahaan dan pengungkapan air. Ketiga, hasil penelitian dapat digunakan untuk mendorong praktik pengungkapan air yang lebih luas di kalangan perusahaan-perusahaan di Indonesia.

Beberapa Penelitian Alfaiz & Aryanti (2019) dan Hidayah et al., (2021) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh *Stakeholder Pressure* terhadap *Water Disclosure*, menunjukkan bahwa perusahaan yang mendapatkan tekanan lebih besar dari lingkungan dan konsumen cenderung memiliki *Sustainability Report*,

penerapan *Stakeholder Pressure* terdapat pengaruh positif terhadap *Water Disclosure*. Sedangkan, hal tersebut berbeda dengan penelitian oleh Rudyanto & Siregar (2018) menunjukkan bahwa *Stakeholder Pressure* berpengaruh negatif terhadap *Water Disclosure*.

Pada beberapa penelitian selanjutnya, yang dilakukan Suharyani et al., (2019) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara *Corporate Governance Disclosure* terhadap *Water Disclosure*. Sedangkan hasil penelitian Almagtome et al., (2020) menunjukkan bahwa *Corporate Governance Disclosure* berpengaruh negatif secara signifikan terhadap *Water Disclosure*. Penelitian – penelitian terdahulu terkait *Water Disclosure* masih menjadi penelitian yang masih baru oleh Zhou et al., (2018). Meskipun penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya, akan tetapi terdapat perbedaan pada metode pengukuran *Stakeholder Pressure* yaitu konsumen, karyawan, lingkungan, dan investor, *Corporate Governance Disclosure* yang diukur dengan perhitungan oleh El Magrhi et al., (2018) dan pengukuran pada *Water Disclosure*, dengan hasil penelitian secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah untuk semua *stakeholder*, variabel yang di teliti, waktu, dan lokasi penelitian. Dengan hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk meningkatkan pentingnya pengungkapan air dan pelaporan untuk meningkatkan akuntabilitas air.

Berdasarkan hasil riset perbedaan penelitian ini masih menunjukkan hasil yang berbeda – beda maka memberikan peluang bagi peneliti untuk meneliti kembali kajian ini. Penelitian ini membawa beberapa implikasi bagi praktisi, pembuat kebijakan, dan akademisi dalam konteks indonesia. Dapat mengambil langkah

untuk menjadi pemimpin dalam pengelolaan air yang lebih baik dan praktik dengan *Water Disclosure* terkait air di Indonesia. Pembuat kebijakan di Indonesia, seperti akuntan profesional dan badan pemerintah, dapat mendorong praktisi dan akuntan di perusahaan untuk meningkatkan tata kelola perusahaan dengan pengungkapan terkait air yang dapat memberikan pedoman dan insentif, serta menyelenggarakan pelatihan yang relevan. Penulis juga menggunakan indeks yang berbeda, disini penulis menggunakan indeks yang sudah disesuaikan dengan perusahaan yang ada di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tersebut dengan judul penelitian “**Pengaruh *Stakeholder Pressure* dan *Corporate Governance Disclosure* Terhadap *Water Disclosure* (Studi Pada Perusahaan Sektor Energy yang tercatat di Bursa Efek Indonesia Tahun (2018 – 2022).**”

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana *Stakeholder Pressure* pada Sektor Energy yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2018 – 2022.
2. Bagaimana *Corporate Governance Disclosure* pada Sektor Energy yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2018 – 2022.
3. Bagaimana *Water Disclosure* pada Sektor Energy yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2018 – 2022.

4. Seberapa besar pengaruh *Stakeholder Pressure* terhadap *Water Disclosure* pada Sektor Energy yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2018 – 2022.
5. Seberapa besar pengaruh *Corporate Governance Disclosure* terhadap *Water Disclosure* pada Sektor Energy yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2018 – 2022.
6. Seberapa besar pengaruh *Stakeholder Pressure* dan *Corporate Governance Disclosure* terhadap *Water Disclosure* pada Sektor Energy yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2018 – 2022.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui *Stakeholder Pressure* pada Sektor Energy yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2018 – 2022.
2. Untuk mengetahui *Corporate Governance Disclosure* pada Sektor Energy yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2018 – 2022.
3. Untuk mengetahui *Water Disclosure* pada Sektor Energy yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2018 – 2022.
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *Stakeholder Pressure* terhadap *Water Disclosure* pada Sektor Energy yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2018 – 2022.

5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *Corporate Governance Disclosure* terhadap *Water Disclosure* pada Sektor Energy yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2018 – 2022.
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *Stakeholder Pressure* dan *Corporate Governance Disclosure* terhadap *Water Disclosure* pada Sektor Energy yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2018 – 2022.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah diharapkan mampu memberikan manfaat yang dapat diambil bagi pihak yang berkepentingan dan memberikan manfaat untuk :

1.4.1 Kegunaan Praktis

Kegunaan dari Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat untuk berbagai pihak, antara lain :

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat membantu peneliti untuk lebih mengetahui dan memahami mengenai Pengaruh *Stakeholder Pressure* dan *Corporate Governance Disclosure* terhadap *Water Disclosure*.

b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak manajemen perusahaan dalam pengambilan kebijakan dalam rangka memaksimalkan pemegang saham dalam pengambilan keputusan, sehingga perusahaan dapat lebih peduli terhadap keberlangsungan lingkungan sekitar dan sosial.

c. Bagi Investor dan Calon Investor

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan perusahaan melalui harga saham dan investor perlu mempertimbangkan kredibilitas perusahaan yang akan datang dan faktor – faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan dalam membagikan keuntungan dengan strategi berinvestasi yang tidak hanya berdasarkan pada kondisi keuangan perusahaan.

d. Bagi Pihak Lain

Diharapkan dapat berguna sebagai masukan dari dokumen – dokumen untuk melengkapi sarana yang dibutuhkan dalam penyediaan bahan studi bagi pihak – pihak yang mungkin membutuhkan sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian sebelumnya.

1.4.2 Kegunaan Teoritis / Akademis

Secara kegunaan teoritis penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangan pemikiran yang diharapkan bisa memperkaya ilmu pengetahuan tentang Pengaruh *Stakeholder Pressure* dan *Corporate Governance Disclosure* Terhadap *Water Disclosure*. Selain itu juga sebagai bahan masukan atau kajian lebih lanjut dan menjadi bahan perbandingan dengan penelitian lain yang memiliki kepentingan berbeda untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu pada Sektor Energy yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 – 2022. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari website www.idx.co.id.